

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. COCA COLA  
DISTRIBUTION INDONESIA DENGAN  
SIGIT HERNOWO SEBAGAI COCA-COLA  
OFFICIAL DISTRIBUTOR**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**NINDA WAHYU HASTAMI**

**C100170072**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. COCA COLA  
DISTRIBUTION INDONESIA DENGAN SIGIT HERNOWO SEBAGAI  
COCA-COLA OFFICIAL DISTRIBUTOR**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

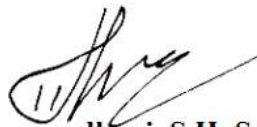
**NINDA WAHYU HASTAMI**

**C100170072**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen**

**Pembimbing**



**Nuswardhani, S.H.,S.U.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. COCA COLA  
DISTRIBUTION INDONESIA DENGAN SIGIT HERNOWO SEBAGAI  
COCA-COLA OFFICIAL DISTRIBUTOR**

**OLEH**

**NINDA WAHYU HASTAMI**

**C100170072**

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada hari Sabtu 8 Mei 2021**

**Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

**1. Nuswardhani, S.H., S.U.**

**(Ketua Dewan Penguji)**

**2. Darsono, SH, MHum.**

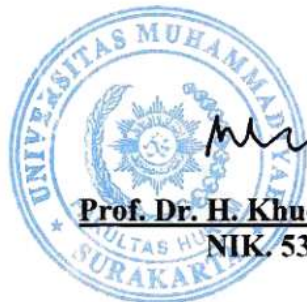
**(Anggota I Dewan Penguji)**

**3. Andrea Luhur P, SH. Mkn**

**(Anggota II Dewan Penguji)**

()  
()  
()

**Dekan,**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

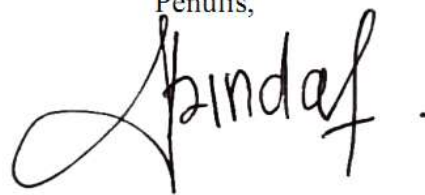
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Mei 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ninda', followed by a period.

**NINDA WAHYU HASTAMI**

**C100170072**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. COCA COLA  
DISTRIBUTION INDONESIA DENGAN SIGIT HERNOWO SEBAGAI  
COCA-COLA OFFICIAL DISTRIBUTOR**

**Abstrak**

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk yang menyangkut dua pihak yaitu pihak PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor salah satu pihak tersebut tidak melaksanakan prestasinya maka akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perjanjian antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor, peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dari perjanjian kerja sama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dari perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini yang diteliti merupakan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor dalam perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Coca-Cola Official Distributor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk, sebelum terjadinya perjanjian harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata yakni: (1) Kata Sepakat (2) Cakap Hukum (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya perjanjian ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk yang telah dibuat oleh PT. Coca-Cola Distribution Indonesia berdasarkan perjanjian baku. Setelah terjadinya kesepakatan timbul hubungan hukum yang mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam pelaksanaan distribusi dan penjualan produk minuman Coca-Cola salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPdata dan jika salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata.

**Kata Kunci :** perjanjian kerjasama, hubungan hukum, tanggung jawab hukum

**Abstrak**

In implementing the cooperation agreement for distribution and product sales involving two parties, namely PT Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit

Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, it is called a reciprocal agreement and therefore creates rights and obligations for the parties. If in the exercise of the rights and obligations between PT. Coca-Cola Distribution Indonesia and Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, one of the parties does not carry out their achievements, it will result in legal liability. The purpose of this study was to determine the agreement process between PT. Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, applicable regulations and rights and obligations of the cooperation agreement between PT. Coca-Cola Distribution Indonesia with Sigit Hernowo as Coca-Cola Official Distributor, as well as legal responsibility if one of the parties makes a mistake in the agreement. The method used in this research is the normative approach method because in this research what is being examined is legal principles, legal principles in legal responsibility between Coca-Cola Distribution Indonesia and Coca-Cola Official Distributor in the distribution and product sales cooperation agreement. The type of research used by the writer in this research is descriptive research to clearly describe the legal responsibility between Coca-Cola Distribution Indonesia and Coca-Cola Official Distributor. The results of this study indicate that in the process of implementing the agreement for distribution and product sales, before the agreement is made, it must meet the administrative and legal requirements in accordance with article 1320 of the civil code, namely (1) agreements (2) Legal Competence (3) Ascertain thing (4) A lawful cause. At the time of the agreement, it was marked by the signing of a distribution agreement and product sales agreement that was made by PT. Coca-Cola Distribution Indonesia based on a standard agreement. After the agreement occurs, a binding legal relationship arises and creates rights and obligations. If in the implementation of distribution and sale of Coca-Cola beverage products, one of the parties does not fulfill its rights and obligations, then it must be responsible for the basis of default in accordance with Article 1243 of the Civil Code and if one of the parties violates the applicable regulations, then it can be held accountable based on the act against the law in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

**Keywords:** cooperation agreement, legal relationship, legal responsibility

## **1. PENDAHULUAN**

Di Indonesia dalam perkembangan dunia usaha sampai sekarang tergolong sangatlah pesat, hal ini dapat kita lihat berkembangnya berbagai jenis-jenis usaha dalam berbagai bidang. Terlebih di era canggihnya teknologi informasi serta teknologi sekarang ini, apapun sekarang dapat diperjual belikan dengan sangat mudah serta cepat hal inilah menuntut para pelaku usaha untuk bertahan serta bersaing dengan usaha lain dalam mengembangkan usaha bisnis, untuk menghadapi hal ini maka dalam mengembangkan dunia usaha diperlukan adanya kerjasama antara satu orang dengan orang atau satu orang dengan badan usaha

untuk meningkatkan efisiensi, memperbesar usaha, serta menjamin ketersediaan pasokan, penjualan dan distribusi. Salah satu bentuk usaha yang sangat pesat perkembangannya di Indonesia yaitu PT. COCA COLA Bottling Indonesia yang memiliki anak perusahaan yaitu Coca-Cola Distribution Indonesia dalam mendukung pendistribusian minuman Coca-Cola ke seluruh wilayah Indonesia, namun dalam menjalankan distribusi ini tidak lepas dari kegiatan usaha kerjasama agar suatu produk dapat berjalan dengan lancar sehingga pihak Coca-Cola Distribution Indonesia untuk memasarkan produk minuman Coca-Cola ke wilayah-wilayah pelosok yang direkomendasikan berkerja sama dengan Coca-Cola Official Distributor sebagai mitra kerja

Dalam menjalankan suatu usaha kerjasama pihak Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor melaksanakan perjanjian kerjasama secara tertulis dengan bertujuan agar para pihak yang melakukan perjanjian akan lebih mempunyai rasa tanggung jawab serta kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. Dengan adanya perjanjian kerjasama inilah maka perikatan itu muncul dan akan terjadinya hak serta kewajiban bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada perjanjian atau kontrak tersebut. Perjanjian akan berlaku apabila undang-undang bagi pembuatnya hal tersebut didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

Pihak PT. Coca Cola Distribution Indonesia berkewajiban dan tanggung jawab untuk memasok atau menjual produk kepada Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor atau disebut dengan CCOD secara tepat waktu dan berusaha sebaiknya agar Sigit Hernowo mempunyai stok. Sedangkan Pihak Sigit Hernowo memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendistribusikan dan menjual aneka ragam produk kepada para pelanggan atau anak outlet yang berada kawasan atau wilayah yang sudah ditentukan. Sehingga dalam proses perjanjian kerjasama ini tidak terlepas dengan kaitannya hubungan hukum yang saling mengikat terhadap para pihak yang berkaitan dengan perjanjian serta kesepakatan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang telah dibuat didalam perjanjian yang telah disepakati Bersama. Maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum oleh para pihak dalam perjanjian

kerjasama sebagai mitra kerja dalam memasarkan produk minuman Coca-Cola . Apabila dalam menjalankan usaha terdapat kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena melakukan pelanggaran perjanjian maka ia harus bertanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi dan jika ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan karena melanggar peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diformulasikan problematika sebagai berikut : 1. Bagaimana Proses perjanjian antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor ? 2. Bagaimana peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dari perjanjian kerja sama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor ? 3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dari perjanjian kerjasama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distribution?

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan normatif karena dalam penelitian ini yang diteliti merupakan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor dalam perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Coca-Cola Official Distributor

Adapun Sumber data Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data sebagai berikut: a) Bahan Hukum Primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata dan Kontrak perjanjian kerjasama antara PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributo. Bahan Hukum Sekunder yaitubuku-buku ilmiah yang terkait, Hasil Penelitian, Jurnal Ilmiah. Bahan Hukum Tersier yaitu : Kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. b) Penelitian Lapangan dalam hal ini meliputi lokasi



penelitian tempat pihak Sigit Hernow Coca-Cola Official Distributor di Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Subyek dalam penelitian ini PT.Coca-Cola Distribution Indonesia yang berhubungan dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor dalam perjanjian kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah: Studi Kepustakaan, Studi Penelitian Lapangan dengan dilakukannya wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dan Sigit Hernowo sebagai Coca Cola Official Distribution ada beberapa proses pelaksanaan perjanjian distribusi minuman coca-cola antara PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca Cola Official Distribution. Pelaksanaan Distribusi dilaksanakan berdasarkan proses-proses yang telah ditentukan oleh pihak Coca-Cola Distribution. Proses-proses tersebut antara lain yaitu Sebelum terjadinya kata sepakat dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum, Syarat Administrasi yaitu a) Coca-Cola Official Distributor memberikan informasi yang jelas mengenai identitas dirinya kepada Coca-Cola Distribution Indonesia b) Mempunyai NPWP dan merupakan PKP / Pengusaha Kena Pajak serta memberikan Salinan dokumen tersebut kepada Coca-Cola Distribution Indonsia c) Coca-Cola Official Distributor memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagai subdistributor dari instansi dan/atau Lembaga yang berwenang d) Coca-Cola Official Distributor memiliki tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas e) Coca-Cola Official Distributor memiliki gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas f) Coca-Cola Official Distributor harus memiliki bank garansi setingg-tingginya Rp. 500.000.000,- sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi. Syarat Hukum yang harus dipenuhi harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: (1) Kata Sepakat; (2) Cakap Hukum; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal

Pada saat terjadinya kesepakatan PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor apabila CCOD dinyatakan sepakat terkait syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat CCDI dan CCOD sepakat mengenai apa yang telah termuat dalam kontrak perjanjian. Dalam hal ini PT. Coca-Cola Distribution Indonesia selaku distributor apabila CCOD sudah sepakat mengenai isi kontrak yang telah dibuat oleh PT.Coca-Cola Distribution Indonesia maka selanjutnya dapat dilaksanakannya peraturan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama bagi PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dan CCOD

Adapun Hak Coca-Cola Distribution Indonesia yaitu : 1) Coca-Cola Distribution Indonesia berhak atas pertimbangan bisnisnya sendiri untuk setiap saat menghentikan sementara pengiriman produk kepada Coca-Cola Distribution Indonesia kepada Coca-Cola Official Distribution dan/atau mengubah wilayah yang direkomendasikan, dan atau mengakhiri perjanjian. 2) Coca-Cola Distribution Indonesia atas penilaiannya sendiri berhak untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu penunjukan melalui pemberitahuan tertulis kepada Coca-Cola Official Indonesia sebelum berakhirnya jangka waktu penunjukan. Kewajiban PT. Coca-Cola Distribution Indonesia yaitu : 1) CCDI akan memasok atau menjual produk kepada CCOD secara tepat waktu dan berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga agar CCOD mempunyai stok minimal 10 hari penjualan dan aneka ragam produk yang cukup. 2) CCDI akan memberikan pelatihan kepada CCOD pada waktu yang ditentukan oleh CCDI. 3) CCDI akan melakukan evaluasi atas kinerja CCOD pada waktu yang akan diberitahukan secara terpisah oleh CCDI kepada CCOD. 4) Atas penilaiannya, sendiri CCDI dapat membantu CCOD dalam melakukan pengembangan pasar di wilayah yang direkomendasikan dengan berbagai cara, termasuk program promosi dan pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari waktu ke waktu. Sedangkan Hak dan Kewajiban CCDI. Hak Coca-Cola Official Distributor yaitu : 1) CCOD berhak mendapatkan informasi mengenai distribusi dan penjualan produk dan hal-hal yang menjadi kewenangan CCDI. 2) CCOD berhak mendapatkan pelatihan serta evaluasi yang dilakukan oleh CCDI dari waktu ke waktu. Kewajiban Coca-Cola Official Distributor yaitu : 1) CCOD wajib

mendistribusikan dan menjual beraneka ragam produk kepada para pelanggan atau anak outlet yang berada di wilayah rekomendasi secara berkesinambungan, konsisten, merata dan tepat waktu agar kebutuhan atas produk di wilayah rekomendasi dapat terpenuhi.

Apabila terjadi suatu permasalahan antara kedua pihak PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor akan menyelesaikannya dengan cara perdamaian melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Timbulnya suatu tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak mengajukan permasalahan melalui pengadilan. Namun sejauh ini PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor belum pernah mengajukan permasalahan melalui jalur pengadilan

Terjadinya wanprestasi apabila dalam proses pelaksanaan distribusi dan penjualan produk Coca-Cola pihak Coca-Cola Official Distributor tidak melaksanakan syarat dan ketentuan dalam perjanjian yang telah di sepakati dapat merugikan pihak PT.Coca-Cola Distribution Indonesia. Sehingga pihak Coca-Cola Official Distribution harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Salah satu contohnya apabila Coca-Cola Official Distributor tidak memenuhi seluruh pembayaran order produk minuman Coca-Cola yang telah disepakati maka Coca-Cola Distribution Indonesia akan memberi peringatan dalam jangka waktu 3 tiga hari, apabila Coca-Cola Official Distributor tidak segera melunasi pembayaran maka Coca-Cola Distribution Indonesia sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis berhak mengakhiri perjanjian ini dan pihak Coca-Cola Distribution Indonesia dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan wanprestasi karena Coca-Cola Official Distributor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjika. Wanprestasi juga dapat terjadi atas kesalahan PT.Coca-Cola Distribution Indonesia. Apabila PT.Coca-Cola Distribution Indonesia tidak memasok dan menjual produk kepada Coca-Cola Official Distributor secara cepat waktu agar Coca-Cola Official Distributor mempunyai stok minimal 10 hari penjualan, maka penyelesaian tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan cara memberikan peringatan sebanyak 3 kali karena PT. Coca-Cola Distribution Indonesia tidak

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila permasalahan tersebut tidak mencapai mufakat dan pihak Coca-Cola Official Distributor masih merasa dirugikan maka Coca-Cola Official Distribution dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan wanprestasi karena pihak PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dalam melaksanakan perjanjian tetapi terlambat untuk memenuhi prestasi

Selain wanprestasi dapat juga terjadi kesalahan dalam perbuatan melawan hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama unsur-unsur yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum yaitu : 1) Adanya tindakan hukum. 2) Memiliki unsur kesalahan. 3) Perbuatan tersebut melawan hukum. 4) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Dalam pelaksanaan proses distribusi dan penjualan barang. Coca-Cola Distribution Indonesia sudah melaksanakannya secara hati-hati, teliti serta sesuai dengan SOP. Namun ada beberapa resiko yang dapat terjadi. Contoh Apabila Coca-Cola Official Distributor dalam mendistribusikan minuman Coca-Cola kepada anak outlet sudah kadaluarsa sehingga merugikan pihak konsumen dikarenakan kurangnya ketelitian dari pihak Coca-Cola Official Distributor maka pihak konsumen dapat mengajukan ke lembaga konsumen, dengan mediasi terlebih dahulu antara konsumen, anak outlet dan Coca-Cola Official Distributor, bahwa dalam menjual minuman kadaluarsa kepada konsumen, anak outlet membuktikan bahwa pada saat pendistribusian minuman tersebut oleh Coca-Cola Official Distributor diserahkan kepada anak outlet ternyata sudah kadaluarsa, sehingga kesalahan tersebut ada pada pihak Coca-Cola Official Distributor, Apabila pada saat mediasi tidak menemukan penyelesaian maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase. atau pihak konsumen dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian berdasarkan keputusan hakim

Overmacht dalam perjanjian kerjasama ini merupakan keadaan memaksa yang mana keadaan dimana PT.Coca-Cola Distribution Indonesia terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Coca-Cola Distribution Indonesia. Adapun Unsur-Unsur Overmacht meliputi : 1) Ada

halangan bagi PT. Coca-Cola Distribution Indonesia untuk memenuhi kewajiban. 2) Halangan itu bukan karena kesalahan PT. Coca-Cola Distribution Indonesia. 3) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko PT. Coca-Cola Distribution Indonesia. Contohnya apabila pada saat pengiriman barang di tengah perjalanan terjadi bencana alam tanah longsor yang mengakibatkan kendaraan yang membawa produk minuman Coca-Cola tidak sampai ke tempat Coca-Cola Official Distributor maka PT. Coca-Cola Distribution Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Coca-Cola Distribution Indonesia dengan Sigit Hernowo sebagai Coca-Cola Official Distributor harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yakni: (1) Kata Sepakat (2) Cakap Hukum (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor apabila Coca-Cola Official Distributor dinyatakan sepakat mengenai syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor sepakat mengenai distributor dan penjualan produk minuman Coca-Cola yang telah termuat dalam perjanjian kerjasama. Setelah terjadinya kesepakatan, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor yang akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Kedua, Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara Coca-Cola Distribution Indonesia dan Coca-Cola Official Distributor, Hak dan Kewajiban Coca-Cola Distribution Indonesia CCDI akan memasok atau menjual produk kepada CCOD secara tepat waktu, serta hak dan kewajiban Coca-Cola Official Distributor yaitu mendistribusikan dan menjual beraneka ragam produk minuman Coca-Cola kepada para pelanggan atau anak outlet yang berada di wilayah rekomendasi. Apabila tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan maka harus bertanggung jawab berdasarkan

wanprestasi dan jika melanggar peraturan maka bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

#### **4.2 Saran**

*Pertama* bagi masyarakat lebih teliti dan hati-hati dalam membeli produk minuman coca-cola dengan melihat tanggal kadaluarsanya, apabila sudah kadaluarsa segera laporkan kepada anak outlet. *Kedua* bagi Coca-Cola Distribution Indonesia selaku pihak distributor hendaklah PT. Coca-Cola Distribution Indonesia dalam membuat sesuatu perjanjian harus memperhatikan isi perjanjian kerjasama tersebut sehingga tidak memberatkan pihak Coca-Cola Official Distributor

*Ketiga* bagi Coca-Cola Official Distributor hendaklah sebelum melaksanakan Perjanjian kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk minuman Coca-Cola terlebih dahulu Coca-Cola Official Distributor membaca dan memahami dengan cermat terkait isi dan syarat dalam Perjanjian kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk minuman Coca-Cola. Karena pada saat terjadi kesepakatan antara Coca-Cola Official Distributor dan Coca-Cola Distribution Indonesia, maka Coca-Cola Official Distributor harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai sub distributor. Ketika Coca-Cola Official Distributor melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum maka pembebanan tanggung jawab bertanggung jawab dibebankan untuk Coca-Cola Official Distributor

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustin, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Averroes Damang, 2011, *Asas-asas Perjanjian*, <https://www.negarahukum.com/asas-asas-perjanjian.html> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

Cocacola.co.id diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 22.00 wib

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1 , Bandung : CitraAditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

<https://widyapertama.blogspot.com/2019/09/makalah-hukum-perjanjian-perjanjian.html?m=1> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020

[https://www.academia.edu/9725259/STATEGI\\_PROMOSI\\_COCA\\_COLA](https://www.academia.edu/9725259/STATEGI_PROMOSI_COCA_COLA),  
diakses pada tanggal 26 september 2020 pukul 10.00 wib

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Muhammad, Abdulkadir. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni..

Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Projodikoro, Wiryono. (1993). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.

Salim, H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafik.

Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan ( Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.

Setiawan, R. (1977). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.

Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Cetakan 19. Jakarta; PT Intermasa BPHN Departemen Kehakiman, Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, 1992 / 1993, Jakarta, hlm.9

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, Prestasi Pustaka.

Tjoanda, M. (2010). Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Peradata, *Jurnal Sasi*, Vol.16, No.4